

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintahan kolonial belanda di Muara Tembesi sudah berdiri sejak 1901 dengan berdirinya Benteng atau Tangsi tentara kolonial belanda di Muara Tembesi. Namun secara resmi pemerintahan kolonial Belanda berkuasa pada 1906 dan Muara Tembesi menjadi wilayah *Onderafdeeling* Muara Tembesi. Tentu bagi masyarakat sekitar itu bukanlah suatu hal yang bisa diterima mereka dengan terbuka, dimana ada pihak luar atau orang asing memerintah ditanah mereka.

Struktur pemerintahan dan struktur sosial yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda tidak disukai dan dianggap tidak adil. Bagi mereka yang memiliki jabatan tertentu pada masa kesultanan diganti dengan orang-orang yang dianggap mendukung pemerintahan kolonial Belanda dan untuk posisi Demang diangkat seorang dari luar daerah, seperti dari Jawa, Palembang dan Sumatra Barat. Selain itu ajaran Islam yang bersifat ortodoks membuat masyarakat tidak menyukai kehadiran kolonial Belanda yang mereka anggap kafir dan musuh agama. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk melawan dan melakukan gerakan sosial.

Gerakan sosial yang dihasilkan dari perubahan sosial yang terjadi pada bulan Agustus 1916 sebagai puncaknya menimbulkan banyak korban dari dipihak kolonial terutama dipihak masyarakat Muara Tembesi korban tewas mencapai ratusan orang. Kolonial Belanda yang merasa bahwa Muara Tembesi daerah yang benar-benar harus di pertahankan sehingga mereka menambah jumlah tentara yang

ada disana. Dan dipihak lain masyarakat di Muara Tembesi mau tidak mau menerima kekuasaan kolonial Belanda sejak kalah dalam perlawanan itu. Selain itu kebijakan yang di terapkan pihak kolonial Belanda membuat mereka tidak bisa lagi melakukan perlawanan.